

TRANSFORMASI DIGITAL UMKM : CERMINAN EVOLUSI SISTEM EKONOMI INDONESIA MENUJU ERA EKONOMI DIGITAL

Riki Kurniawan, Marselina Safitri, Danu Agus P, Agung Nugroho, Annissa Arieffiani

Program Studi Manajemen, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

E-mail : marselina.safitri.23@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mengulas mengenai dinamika transformasi digital Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai refleksi dari evolusi sistem ekonomi Indonesia dalam menghadapi era digital global. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif-kualitatif yang mengkaji perkembangan ekonomi nasional dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi, serta menganalisis kebijakan Program Transformasi Digital UMKM 2025. Program ini dipandang sebagai upaya strategis untuk meningkatkan literasi digital, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing UMKM melalui sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Transformasi ini tidak hanya menekankan pemanfaatan teknologi, tetapi juga merepresentasikan implementasi nilai-nilai ekonomi Pancasila, seperti keadilan, gotong royong, dan inklusivitas. Artikel ini menyimpulkan bahwa digitalisasi UMKM merupakan langkah krusial dalam membangun sistem ekonomi Indonesia yang adaptif, adil, dan berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi global.

Kata Kunci : UMKM, transformasi digital, sistem ekonomi Indonesia, ekonomi Pancasila, ekonomi digital.

Article history

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagirism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia telah mengalami transformasi besar sejak era kemerdekaan, mulai dari sistem ekonomi nasionalis, sistem ekonomi terpusat pada masa Orde Baru, hingga terbukanya ruang bagi liberalisasi pasar pada masa Reformasi. Dalam proses evolusinya, sistem ekonomi Indonesia senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi domestik serta tekanan dari lingkungan global. Memasuki era modern, Indonesia mulai dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang baru yang ditandai oleh semakin pesatnya perkembangan digitalisasi ekonomi.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, berkontribusi terhadap lebih dari 60% PDB nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Namun, sektor ini juga menjadi yang paling rentan terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, pada tahun 2024–2025, pemerintah Indonesia menggulirkan Program Transformasi Digital UMKM sebagai upaya akselerasi adaptasi ekonomi kerakyatan dalam kerangka ekonomi digital global.

Program ini tidak hanya berfungsi sebagai langkah strategis dalam meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil, tetapi juga mencerminkan dinamika perkembangan sistem perekonomian nasional yang terus bergerak menuju arah yang lebih terbuka, inklusif, dan berbasis teknologi. Transformasi ini menjadi bagian dari respon adaptif terhadap tuntutan era digital dan globalisasi, di mana inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya dilihat sebagai peluang, tetapi juga sebagai kebutuhan struktural dalam pembangunan ekonomi nasional.

METODE PENULISAN

Penulisan ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data yang digunakan berasal dari sumber-sumber sekunder seperti artikel ilmiah, jurnal, berita daring, dokumen kebijakan pemerintah, serta literatur ilmiah relevan lainnya. Metode ini dipilih untuk mengkaji dan menganalisis fenomena ekonomi yang terjadi dengan mengacu pada teori, konsep, dan data yang telah dipublikasikan, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap topik yang dibahas.

Tinjauan Historis Sistem Perekonomian Indonesia

1. Masa Orde Lama (1945–1965)

Pada masa ini, Indonesia mengadopsi sistem ekonomi nasionalistik dengan kontrol kuat negara terhadap sumber daya ekonomi. Peran swasta asing dibatasi, dan arah kebijakan ekonomi lebih didorong oleh pertimbangan politik daripada efisiensi pasar. Meskipun sistem ini berhasil menciptakan stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, krisis hiperinflasi dan ketidakstabilan ekonomi tetap menjadi ciri khas di akhir periode tersebut. Sentralisasi kekuasaan ekonomi oleh negara juga menimbulkan tantangan, seperti ketimpangan pembangunan antarwilayah dan ketergantungan berlebihan pada sektor sumber daya alam. Faktor utama dari kebijakan sentralisasi ini adalah keinginan untuk membangun ekonomi nasional yang kuat dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

2. Masa Orde Baru (1966–1998)

Pada masa Orde Baru, Indonesia menerapkan kebijakan ekonomi yang membuka pintu bagi investasi asing guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pemerintah tetap mempertahankan kontrol atas sektor-sektor strategis melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pendekatan ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, namun juga memunculkan tantangan seperti ketimpangan pendapatan dan ketergantungan pada modal asing.

3. Masa Reformasi (1998–sekarang)

Pasca krisis ekonomi 1997–1998, Indonesia mulai membuka diri terhadap liberalisasi ekonomi secara lebih luas, ditandai dengan penerapan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Langkah ini mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk sektor UMKM yang berkembang cukup pesat. Namun, pertumbuhan tersebut masih dibayangi berbagai kendala, seperti terbatasnya akses terhadap modal usaha, keterlambatan adopsi teknologi, serta kesulitan dalam memperluas jangkauan pasar.

Analisis Program Transformasi Digital UMKM 2025

Latar Belakang Program

Program Transformasi Digital UMKM 2025 merupakan inisiatif strategis berskala nasional yang digagas oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk mempercepat adopsi teknologi informasi di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini hadir sebagai respons terhadap dinamika ekonomi digital yang terus berkembang pesat, di mana UMKM menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persaingan global yang semakin kompetitif, keterbatasan dalam mengakses teknologi mutakhir, rendahnya tingkat literasi digital, hingga kesulitan dalam terintegrasi secara optimal ke dalam ekosistem digital nasional.

Sebagai upaya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) bersinergi dengan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Badan Usaha Milik Negara (BUMN), startup digital, dan institusi keuangan, dengan merumuskan dan melaksanakan berbagai program pendukung yang bertujuan memperkuat kapasitas digital UMKM. Beberapa di antaranya meliputi program digital onboarding untuk memperkenalkan UMKM ke platform digital, pelatihan literasi digital berbasis daring, pemberian bantuan infrastruktur teknologi, serta pemberian insentif untuk mempermudah akses pembiayaan berbasis digital. Inisiatif ini diharapkan tidak hanya meningkatkan daya saing UMKM secara nasional dan global, tetapi juga mendorong terciptanya transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tujuan Strategis Program

Program ini dirancang dengan tujuan utama untuk meningkatkan literasi digital di kalangan pelaku UMKM, agar mereka dapat lebih memahami dan memanfaatkan teknologi dalam kegiatan usaha sehari-hari. Dengan demikian, UMKM diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan berbagai alat digital untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memperluas akses pasar bagi UMKM melalui pemanfaatan platform e-commerce dan media sosial, yang menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan produk mereka kepada konsumen yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Selanjutnya, program ini juga menitikberatkan pada upaya peningkatan efisiensi operasional UMKM dengan mengimplementasikan aplikasi kasir digital, sistem pembukuan berbasis teknologi, serta penerapan strategi pemasaran daring yang lebih optimal. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meminimalisir biaya operasional sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan usaha. Selain itu, program ini bertujuan untuk menumbuhkan ketahanan ekonomi kerakyatan yang

berbasis pada transformasi digital inklusif, sehingga UMKM dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tumbuh dalam ekosistem ekonomi digital yang semakin berkembang.

Keterkaitan dengan Sistem Ekonomi Indonesia

Program Transformasi Digital UMKM 2025 dapat dipandang sebagai perwujudan sistem ekonomi Pancasila dalam era modern. Menurut Marsudi, (2022) Sistem perekonomian Pancasila merupakan suatu pendekatan ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila, dengan menitikberatkan pada partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Asas utama dalam sistem ekonomi Pancasila mencakup moralitas, keadilan, kekeluargaan, dan gotong royong nasional. Sistem ini memberikan kebebasan kepada pelaku ekonomi, namun tetap menetapkan pedoman dan batasan bagi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjalankan aktivitas ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini tercermin secara nyata dalam sejumlah aspek penting yang menunjukkan implementasi nilai-nilai ekonomi Pancasila dalam praktik.

- **Peran aktif negara sebagai fasilitator**

Pemerintah berperan penting dalam mendukung UMKM melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti akses transportasi, teknologi, dan fasilitas distribusi. Selain itu, pemerintah juga menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM dalam manajemen, pemasaran, dan pengembangan produk. Regulasi yang tersebut memiliki tujuan untuk mendukung pertumbuhan UMKM tanpa menimbulkan monopoli ekonomi, dengan menciptakan iklim usaha yang adil dan mengurangi hambatan birokrasi. Secara keseluruhan, kebijakan ini membantu UMKM untuk berkembang, berinovasi, dan berkontribusi pada perekonomian.

- **Kerja sama antara sektor publik dan swasta.**

Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan teknologi, lembaga keuangan, dan masyarakat mencerminkan prinsip koperasi dan partisipasi bersama, yang penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki peran untuk menyediakan regulasi dan infrastruktur, perusahaan teknologi dapat memberikan penawaran solusi digital, lembaga keuangan memberikan akses

pendanaan dan literasi keuangan yang lebih mudah, sementara masyarakat mendukung dengan partisipasinya. Sinergi antara semua pihak ini bertujuan untuk mencapai kemajuan ekonomi yang adil, merata, dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

- **Keadilan dalam ekonomi**

Fokus pada pemberdayaan UMKM di wilayah tertinggal, pelaku usaha perempuan, dan kelompok rentan adalah langkah nyata untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi. Dengan memberikan akses yang setara terhadap peluang usaha, sumber daya, dan dukungan, kita dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup. Pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan juga mendorong kesetaraan gender dan inklusi sosial, serta memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan untuk berkembang secara ekonomi, memperkuat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Capaian dan Tantangan

Pengembangan e-commerce telah menjadi salah satu topik menarik dalam dinamika pembangunan ekonomi negara. Di Indonesia, UMKM didukung oleh ekonomi. Untuk digitalisasi berdasarkan pengembangan teknologi, UMKM di Indonesia harus berpartisipasi dalam implementasi kegiatan bisnis elektronik mereka. Pemerintah bertujuan untuk mencapai hingga 30 juta UMKM di Indonesia pada tahun 2025 untuk beralih ke pasar elektronik. Saat ini, UMKM yang beroperasi telah mencapai 19 juta digitalisasi. Digitalisasi adalah langkah untuk meningkatkan kualitas UMKM di Indonesia dan dapat meningkatkan kelas.

Pembangunan e-commerce menawarkan manfaat ekonomi yang besar, sementara juga menimbulkan tantangan bagi produk domestik. Tantangan untuk produk domestik ditantang karena keberadaan e-commerce telah menciptakan pasar yang tidak terbatas. Beberapa pedoman telah dipublikasikan oleh pemerintah, salah satunya adalah, misalnya, seorang menteri dengan nomor peraturan keuangan 199/PMK/010/2019 dalam hal pajak impor. Pemerintah yang dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk melindungi produk domestik dan dapat meningkatkan daya saing penjual lokal. Ini penting ketika Anda mempertimbangkan bahwa persaingan di pasar e-commerce lebih sempit daripada pasar tradisional. (Darmastuti dkk., 2023)

Strategi yang diambil oleh pelaku UMKM di Indonesia untuk menggunakan e-commerce termasuk peningkatan pangsa pasar luar negeri, meningkatkan unit produksi, meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan iklan online. Sayangnya, broadband internet Indonesia belum mencapai daerah pedesaan yang luas. Ketika datang ke konsumen, masih ada banyak pelanggan yang kurang mampu untuk kemampuan digital. Bahkan, kehadiran Internet telah memudahkan bisnis untuk mempromosikan produk dan layanan mereka. Pendanaan produk tidak dilakukan melalui radio atau media cetak, tetapi melalui media sosial di internet. Di Indonesia, pengembangan pendanaan produk melalui teknologi internet tidak dapat sepenuhnya diimplementasikan oleh pengusaha. Sumber daya yang terbatas dan manajemen media sosial akan menjadi masalah yang tersedia di bawah kebangkitan e-commerce. E-commerce Indonesia perlu memahami kebutuhan dan preferensi konsumen lokal dan menggunakan kebijaksanaan lokal untuk menyediakan produk dan layanan yang lebih relevan. Ini memberikan keunggulan kompetitif karena pasar, budaya, dan adat istiadat konsumen Indonesia lebih dipahami. Penggunaan kebijaksanaan lokal berharap bahwa e-commerce Indonesia akan memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik sambil juga memenuhi kebutuhan khusus yang tidak dapat dipenuhi oleh pesaing negara lain. (Aysa, 2021)

Sementara itu, kami mengamati bahwa revolusi digital dalam ekonomi Indonesia tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif. Beberapa dampak positif yang dapat diperoleh dari digitalisasi untuk pengembangan ekonomi Indonesia meliputi:

(a) pangsa pasar yang luas, ekonomi digital membuat pengusaha mudah untuk mempertahankan konsumen dan pemasok. Dengan pengembangan e-commerce, jaringan pasar akan memiliki ruang dan waktu yang lebih luas dan lebih tidak terbatas, sehingga tidak perlu membeli pembelian dan penjualan tradisional. Bahkan pada tahun 2019, pendapatan e-commerce Indonesia mencapai \$ 6 miliar, dengan pertumbuhan diperkirakan akan menembus 18% per tahun, berkontribusi terhadap US \$ 35 miliar dari PDB.

(b) produksi meningkat, banyak manfaat yang akan dirasakan perusahaan yang bertransformasi industri 4.0, diantaranya adalah menurunkan biaya dan waktu luang, meningkatkan kinerja mesin dan peralatan, serta meningkatkan kecepatan operasi produksi dan kualitas produk.

(c) Pembayaran itu mudah karena terhubung ke internet dari perspektif iklan dan jaringan pasar. Oleh karena itu, pelaku bisnis tidak perlu bertemu dengan konsumen atau mitra. Bank adalah jembatan layanan pembayaran atau iklan layanan perbankan lainnya, dan iklan lebih beragam dan kreatif. Di perusahaan yang menggunakan media internet, pengusaha bisa memanfaatkan waktu 24 jam dalam sehari. berbeda dengan bisnis konvensional yang menggunakan waktu jam kerja sehari. Persyaratan ini mensyaratkan bahwa pengusaha atau perusahaan sulit mempertahankan keunggulan kompetitif karena pihak lain dapat dengan mudah ditiru. Oleh karena itu, untuk menjadi pemimpin pasar, diperlukan secara konsisten melaksanakan kecepatan inovasi.

Sedangkan dampak negatifnya meliputi:

(a) Kurangnya serapan tenaga kerja, perusahaan lebih memprioritaskan keuntungan digitalisasi untuk lebih efisien dalam biaya produksi. Misalnya, karyawan bekerja di pabrik atau di industri otomotif tempat mereka dipekerjakan pada perakitan. Sekarang sedang digantikan oleh robot cerdas dengan teknologi digital yang sangat maju dan terorganisir. Ini adalah penggunaan mesin produksi yang lebih unggul dari sumber daya manusia sebagai mesin produksi. Ini adalah peran UMKM dalam digitalisasi menjadi solusi bagi kaum muda yang sangat baik dan dapat menerima pekerja.

(B) rentan terhadap penipuan dan sering menyebabkan penipuan digital karena penyalahgunaan atau penyelewengan data pribadi menggunakan teknologi. Kita sudah tahu bahwa modus penipuan digital beragam saat ini, tetapi beberapa orang, alih-alih meneliti untuk menerima data pribadi, seperti penjualan produk dari harga diskon besar di situs web e-commerce tidak resmi. Tapi sekarang kampanye ini lebih praktis karena didukung oleh teknologi. Sangat mudah untuk mendapatkan sumber referensi untuk teks, foto, foto, musik, dan banyak lagi, terutama di era digital. Kuncinya adalah bahwa pelanggaran seperti hak cipta, plagiarisme, dan pelanggaran hak cipta dapat dengan mudah dipenuhi. sengaja atau tidak sengaja. Selain mudah dilakukan, konten juga umumnya merupakan konsumsi umum, jadi mudah untuk melihat bahwa konten yang digunakan adalah hasil dari kecurangan

Evaluasi Sistem Ekonomi yang Pernah Diterapkan

1. Sistem Ekonomi Orde Lama

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia mengadopsi sistem ekonomi campuran dengan dominasi negara melalui kebijakan nasionalisasi perusahaan asing. Namun, pada era Presiden Soekarno, terutama sejak Dekrit Presiden 1959, diterapkan *ekonomi terpimpin* yang menempatkan negara sebagai pengendali utama perekonomian. Pemerintah mengedepankan nasionalisme ekonomi dengan menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dan membatasi investasi luar negeri. Meskipun bertujuan untuk memperkuat kemandirian ekonomi, kebijakan ini tidak diimbangi dengan manajemen ekonomi yang efektif, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan.

Salah satu tantangan utama adalah inflasi yang sangat tinggi, mencapai 600% pada pertengahan 1960-an. Hal ini disebabkan oleh defisit anggaran yang besar, pembiayaan proyek-proyek besar seperti pembangunan monumen nasional, dan kurangnya kontrol terhadap peredaran uang. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun drastis, dan perekonomian mengalami stagnasi.

2. Sistem Ekonomi Orde Baru

Setelah pergantian kekuasaan, Orde Baru di bawah Presiden Soeharto fokus pada stabilisasi ekonomi dan pembangunan. Pemerintah mengadopsi pendekatan ekonomi terbuka dengan mendorong investasi asing melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967. Kelompok ekonom yang dikenal sebagai "Mafia Berkeley" memainkan peran penting dalam merancang kebijakan ekonomi yang pragmatis.

Program pembangunan lima tahunan (REPELITA) diluncurkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan Orde Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun dan menurunkan angka kemiskinan dari 60% menjadi 11% antara 1970 hingga 1996. Namun, ketergantungan pada ekspor komoditas primer membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga global. Selain itu, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merajalela, menciptakan ketidakadilan ekonomi dan inefisiensi di berbagai sektor. Krisis moneter Asia 1997-1998 menjadi puncak kerentanan ini, menyebabkan runtuhnya ekonomi dan kejatuhan rezim Orde Baru.

3. Sistem Ekonomi Era Reformasi

Krisis moneter Asia pada 1997–1998 mengguncang fondasi ekonomi Orde Baru, menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar 13,1% pada 1998. Krisis ini memicu reformasi politik dan ekonomi yang signifikan. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk melaksanakan program restrukturisasi ekonomi, termasuk reformasi sektor perbankan dan penghapusan monopoli.

Pada era Reformasi, Indonesia berupaya memperkuat institusi demokrasi dan transparansi dalam pengelolaan ekonomi. Otonomi daerah dalam pengelolaan anggaran untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas terhadap kebutuhan lokal. Penataan ulang sistem perbankan dan pengawasan keuangan untuk mencegah krisis serupa di masa depan. Dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Penyederhanaan regulasi dan perizinan untuk menarik investasi domestik dan asing. Reformasi ekonomi berhasil menstabilkan perekonomian dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.

Namun, tantangan seperti ketimpangan ekonomi, korupsi, dan birokrasi yang kompleks masih menjadi hambatan dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata. Meskipun menghadapi tantangan seperti korupsi dan birokrasi yang kompleks, Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi yang stabil, dengan rata-rata sekitar 5% per tahun pada dekade 2000-an. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk memperkuat institusi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong inovasi dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Relevansi Sistem Ekonomi Indonesia Saat Ini dengan Kondisi Global dan Simpulan

Relevansi Sistem Ekonomi Indonesia di Era Digital Global

Sistem ekonomi Indonesia saat ini tetap berpegang pada prinsip Sistem Ekonomi Pancasila, namun telah bertransformasi untuk lebih inklusif dan terbuka terhadap pasar global. Perubahan ini memungkinkan Indonesia untuk mengintegrasikan ekonomi digital secara lebih luas, dengan tujuan memperkuat daya saing di pasar global sambil mempertahankan nilai-nilai sosial.

Dalam konteks digitalisasi UMKM, Indonesia menerapkan strategi hybrid yang menggabungkan peran negara yang kuat dengan memberikan ruang bagi sektor swasta untuk berinovasi. Strategi ini bertujuan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM dengan mendorong ekonomi berbasis pengetahuan dan memperkuat kemampuan digital pelaku UMKM. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing UMKM dalam pasar global.

Program Transformasi Digital UMKM merupakan respons terhadap tantangan global, seperti digitalisasi ekonomi dan kompetisi e-commerce lintas negara, dengan fokus pada pembangunan ketahanan ekonomi lokal berbasis teknologi. Program ini bertujuan memastikan inklusivitas ekonomi melalui penyediaan akses teknologi bagi UMKM, menjaga keseimbangan antara keadilan sosial dan efisiensi pasar global, serta memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi digital global yang semakin berkembang.

Simpulan

Perjalanan sistem ekonomi Indonesia mencerminkan dinamika adaptasi yang terus berkembang terhadap berbagai tantangan politik, sosial, dan global. Dari sistem ekonomi tertutup yang diterapkan pada era Orde Lama, hingga transformasi menuju keterbukaan dan kolaborasi digital yang terjadi di masa kini, Indonesia senantiasa berupaya menyeimbangkan peran negara, keadilan sosial, dan respons terhadap dinamika pasar global yang semakin kompleks. Seiring berjalannya waktu, Indonesia semakin terbuka terhadap integrasi dalam perekonomian global tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila.

Program Transformasi Digital UMKM 2025 bukan hanya sebuah kebijakan teknis yang bertujuan mempercepat adopsi teknologi oleh UMKM, tetapi juga merupakan manifestasi dari evolusi pemikiran ekonomi Indonesia yang semakin progresif dan relevan dengan perkembangan zaman. Dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila, program ini diharapkan dapat memperkuat peran UMKM sebagai pilar utama ekonomi Indonesia, sekaligus memanfaatkan potensi teknologi untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif. Melalui transformasi digital, Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun sistem ekonomi masa depan yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan, serta mampu bersaing di pasar global yang semakin kompetitif.

Daftar Pustaka

- Aysa, I. R. (2021). Tantangan Transformasi Digital Bagi Kemajuan Perekonomian Indonesia. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 3(2), 140–153. <https://doi.org/10.33367/at.v2i3.1458>
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan perekonomian Indonesia 2023*. Bank Indonesia.
- Basri, F. (2020). *Ekonomi Indonesia: Dari Orde Lama ke ekonomi digital*. Kompas.
- Darmastuti, S., Juned, M., Saraswati, D. P., Utami, R. A. A., & Raharjo, P. (2023). Peluang Dan Tantangan UMKM Di Indonesia Dalam Perkembangan e-Commerce: Studi Perbandingan Dengan UMKM Di Negara-negara ASEAN. *SOSIO DIALEKTIKA*, 8(1), 42. <https://doi.org/10.31942/sd.v8i1.8786>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024). *Statistik program digitalisasi UMKM*.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2024). *Roadmap transformasi digital UMKM Indonesia 2025*.
- Liputan6.com. (2024, April 10). *Transformasi digital UMKM jadi prioritas pemerintah tahun 2025*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/ekonomi/read/4731263/transformasi-digital-umkm-jadi-prioritas-pemerintah-tahun-2025>
- Sukirno, S. (2016). *Pengantar teori mikroekonomi*. Rajawali Pers.
- Tambunan, T. T. H. (2019). *UMKM di Indonesia: Isu-isu penting*. LP3ES.
- World Bank. (2023). *Indonesia economic prospects: Digitalization for inclusive growth*. World Bank Group.